

Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur

¹ Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia

² Badjuri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia

³ Moh. Adenan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jember (UNEJ), Indonesia

Informasi Naskah

Submitted: 23 Januari 2019

Revision: 18 Februari 2019

Accepted: 18 Maret 2019

Kata Kunci:

Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto.

Abstract

Equity of development is created when development is not only centered on growth centers, but through regional development. As has been applied by the government of Indonesia with the intensification of development programs in the region, especially the development of periphery areas. In order to smooth development in the region, then the region must have a good financial condition. In fact, the financial aspect is a central issue of local government in terms of revenue and expenditure for the sake of prospering the community. The purpose of this study is to know the magnitude of the influence of local revenues, general allocation funds, and gross regional domestic product to regional spending in East Java. And also see the variables that have the most dominant effect on regional expenditure. The method used is multiple linear regression using the classical assumption test (Ordinary Least Square) using panel data, the type of data used is secondary data include local revenue, general allocation funds, and regional gross domestic product to the regional expenditure of 2012-2016. The result of data analysis with multiple linear regression obtained result from research indicate that local revenue, general allocation fund and gross regional domestic product have positive and significant influence to regional expenditure in East Java.

Abstrak

Pemerataan pembangunan tercipta ketika pembangunan tidak hanya terpusat pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan melalui pembangunan wilayah di daerah. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan digencarkannya program pembangunan di daerah, terutama pembangunan daerah pinggiran. Guna lancarnya pembangunan di daerah, maka daerah harus memiliki kondisi keuangan yang baik. Padahal, aspek keuangan merupakan masalah pokok pemerintah daerah dalam segi penerimaan maupun pengeluaran demi kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui besarnya pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah yang ada di Jawa Timur. Dan juga melihat variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap belanja daerah. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (Ordinary Least Square) dengan menggunakan data panel, jenis data yang digunakan adalah data sekunder meliputi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan produk domestik regional bruto terhadap belanja daerah tahun 2012-2016. Hasil analisa data dengan regresi linier berganda diperoleh hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah di Jawa Timur.

* Corresponding Author.

Ferlianto Putro Dwi Nurwahyu, e-mail: ferlianto716@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Pemerataan pembangunan tercipta ketika pembangunan tidak hanya terpusat pada pusat-pusat pertumbuhan saja, melainkan melalui pembangunan wilayah di daerah. Sebagaimana yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dengan digencarkannya program pembangunan di daerah, terutama pembangunan daerah pinggiran. Untuk menciptakan suatu pembangunan daerah yang adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia 1945, pemerintah menetapkan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan republik dan terbagi atas beberapa wilayah yang bersifat otonom. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007). Otonomi daerah di Indonesia diatur oleh UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU. No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah (Ulum, 2004). Pemerintah mengharapkan dari UU terbaru tersebut suatu daerah lebih mampu melaksanakan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan yang lebih prima (Murjana, 2016).

Guna lancarnya pembangunan di daerah, maka daerah harus memiliki kondisi keuangan yang baik. Padahal, aspek keuangan merupakan masalah pokok pemerintah daerah dalam segi penerimaan maupun pengeluaran demi kesejahteraan masyarakat. Menurut Kaho (1998), aspek keuangan merupakan satu dasar kriteria guna mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan yang memadai dengan menuntut pemerintah daerah agar mampu mengelola keuangan daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah, apabila kinerja keuangan daerah dinyatakan baik, maka daerah tersebut memiliki kemampuan untuk pembiayaan pelaksanaan urusan daerah dalam otonomi daerah. Apabila realisasi PAD masih tergolong kecil dan masih belum mencukupi pembiayaan daerah maka menandakan bahwa rasio keuangan daerah tersebut masih tergolong rendah (Prawoto, 2014). Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 tertera pada tabel 1. berikut:

Tabel 1.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur Tahun 2012-2016

Subjek	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Pajak Daerah	7.502.400.	7.863.719.6335	9.285.000	12.591.000	12.579.000.000.000
Retribusi Daerah	12.366.397	1.264.057.555	104.887.319.435	136.337.487	111.423.347.740
Bagian Laba BUMD	320.317.073.588	328.891.596.516	33.996.774.508	351.344.506	365.628.869.523
Pendapatan Lain-lain	1.121.779.005	120.488.498.196	137.370.973.732	1.692.457.282	2.189.189.582.950
PAD	9.068.160.048.588	9.523.901.967.476	11.103.564.801.835	14.771.139.275	15.245.241.800.213
TOTAL					

(Sumber: DJPK Jawa Timur, 2012 - 2016)

Berdasarkan tabel 1 tentang perkembangan realisasi penerimaan daerah propinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan bahwa sumber penerimaan asli

daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD dan pendapatan lain-lain hasil kekayaan daerah semakin meningkat tiap tahunnya.

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Salah satunya yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU No. 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai Belanja Daerah di daerahnya.

Aktivitas pembangunan dan program-program layanan publik misalnya belanja daerah bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan pengelolaan sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan berdampak besar terhadap kondisi produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun). Berikut merupakan tabel bidang kesehatan dan PDRB pada Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 :

Tabel 2.

Belanja Daerah Bidang Kesehatan dan Provinsi PDRB Jawa Timur Tahun 2012-2016

Subjek	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Bidang Kesehatan	1.838.068.137.951	2.070.310.334.	2.256.644.386.	2.958.318.404.	3.344.147.112.
PDRB	1.124.464.600	1.382.501.500	1.537.947.600	1.692.903	1.705.236.100

(Sumber: BPS Jawa Timur, 2012-2016)

Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa dari tahun 2012 sampai tahun 2016 belanja daerah Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan. Begitu juga, dengan Produk Domestik Regional Bruto juga semakin naik. Hal ini mengartikan bahwa kinerja keuangan Provinsi Jawa Timur berjalan baik karena sistem pembangunan ekonominya telah terealisasi secara nyata, dimana belanja daerah bidang kesehatan tiap tahunnya meningkat sehingga PDRB juga meningkat.

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Teori Adam Smith tergolong pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut teori pertumbuhan ekonomi klasik bahwa, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan perkapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan, dan akan membawa pada keadaan pendapatan perkapita sama dengan produksi marginal. Keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik optimal maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. Adapun bunyi dari teori Adam Smith adalah *“An inquiry into the nature and causes of the wealth of the nation”*, teorinya yang dibuat dengan teori *the invisible hands* (teori tangan-tangan gaib). Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan *output* total (Ricardo dan Hariani, 2008).

2. Teori Dualisme Boeke

Teori dualisme dikembangkan pertama kali oleh pemikir berkebangsaan Belanda, yaitu J.H. Boeke, yang mencermati pada negara-negara bekas jajahan negaranya, khususnya Indonesia. Boeke melihat, bahwa nilai-nilai sosial budaya menjadi unsur yang secara absolut mempengaruhi proses pembangunan. Menurut Boeke, apabila masyarakat terlalu terpaku pada tata sosial budaya yang ada, maka usaha menggerakkan stagnasi ekonomi tidak akan

berhasil. Pengamatan Boeke sejauh ini menunjukkan bahwa tata sosial budaya masyarakat negara berkembang (terutama Indonesia) masih bersifat tidak rasional dan kaku sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan pola/ irama perekonomian modern dengan bentuk kelembagaan usaha yang praktis dan dinamis. Kondisi ini tampak terkait dengan dualisme yang berkembang di kalangan masyarakat negara-negara berkembang dalam menggerakkan perekonomiannya. Dualisme yang dimaksud oleh Boeke adalah menyangkut cara pandang terhadap kesesuaian antara budaya luar dan budaya lokal. Sebagian masyarakat memandang bahwa benturan antara budaya luar (bersumber dari barat) dengan budaya lokal (penduduk asli/pribumi) dianggap tidak bisa berubah (permanen), tidak dapat dihindari dan benturan ini pada akhirnya dianggap yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi oleh masyarakat tradisional setempat. Teori ini membedakan antara kebutuhan yang bersifat ekonomis dan kebutuhan yang bersifat sosial.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan tiga variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Belanja Daerah, sedangkan variabel independen yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto. Wilayah penelitian di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Selama waktu lima tahun dari 2012 – 2016.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek-obyek (satuan/individu) yang mempunyai karakteristik tertentu. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah data DAU, PAD, Belanja Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang meliputi 29 daerah Kabupaten dan 9 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 38 data.

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *full sampling*, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2012-2016, dengan jumlah sampel sebanyak 38 daerah, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $5 \times 38 = 190$ data.

Jenis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Supranto, 1999). Data sekunder yang digunakan adalah Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2012-2016.

Analisis Regresi

Metode ini menggunakan analisis data regresi linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik (*Ordinary Least Square*) dengan menggunakan data panel. Metode regresi data panel ini digunakan untuk mengestimasi pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Melalui metode *OLS* ini maka akan memberikan hasil regresi yang baik tentang pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Nachrowi & Usman, 2006:11). Data panel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi antara data runtun waktu (*time series*) dan data deret lintang (*cross section*).

Dalam model data panel persamaan model dengan menggunakan data *cross section* dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_i + \varepsilon_i ; i = 1, 2, \dots, N$$

Dimana N adalah banyaknya data *cross section*.

Sedangkan model data panel dengan persamaan model data *time series* adalah:

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_t + \varepsilon_t ; t = 1, 2, \dots, T$$

Dimana T adalah banyaknya data *time series*.

Data panel merupakan gabungan dari data *time series* dan *cross section*, maka dapat ditulis dengan model berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_{it}$$

$T = 1, 2, \dots, T$; dan $i = 1, 2, \dots, N$

Keterangan :

T = Banyaknya waktu

N = Banyaknya obsevarsi

N x T = Banyaknya data panel

Adapun fungsi model ekonomi dari variabel penelitian sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3)$$

Model ekonomi tersebut kemudian ditransformasikan kedalam model ekonometrika dengan menggunakan data panel menjadi:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + e_{it}$$

$i = 1, 2, \dots, 38$; $t = 1, 2, \dots, 4$

$i = 1, 2, \dots, 38$; $t = 1, 2, \dots, 4$

Dimana :

Y : Belanja Daerah (Rupiah)

X1 : Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

X2 : Dana Alokasi Umum (Rupiah)

X3 : Produk Domestik Regional Bruto(Rupiah)

α : intersep

β_{it} : koefisien varabel

$i = 1, 2, \dots, 38$: banyaknya sampel obsevarsi

$t = 1, 2, \dots, 5$: banyaknya sampel waktu

e_{it} : variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Setelah menganalisis data ke 190 data penelitian, tahap selanjutnya adalah mengolah data statistik deskriptif variabel penelitian. Hasil pengolahan data statistik deskriptif variabel penelitian tampak pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.
Hasil Statistik Deskriptif

Keterangan	Min	Max	Mean
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	31,4	924,9	180,851
Dana Alokasi Umum (X ₂)	309,1	1,709	856,021
Produk Domestik Regional Bruto (X ₃)	03	,893	
Belanja Daerah (Y)	140	76,3	11,229
		36	
	20,2	946,8	141,453
	60	39	

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 3 dapat diketahui bahwa dengan jumlah data sebanyak 190 data, Pendapatan Asli Daerah (X_1) mempunyai rata-rata (*Mean*) sebesar 180,851 dengan jumlah minimal 31,494 dan maksimal 924,976. Variabel Dana Alokasi Umum (X_2) mempunyai rata-rata (*Mean*) sebesar 856,021 dengan jumlah minimal 309,103 dan maksimal 1,709,893. Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X_3) mempunyai rata-rata (*Mean*) sebesar 11,229 dengan nilai minimal 140 dan maksimal 76,336. Variabel Belanja Daerah (Y) mempunyai rata-rata (*Mean*) 141,453, jumlah minimal 20,260 dan maksimal 946,839.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda sebagai berikut.

Tabel 4.
Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	Sig.	Keterangan
Konstan	0,935	-	-
Pendapatan Asli Daerah (X_1)	0,206	0,000	Signifikan
Dana Alokasi Umum (X_2)	0,347	0,000	Signifikan
Produk Domestik Regional Bruto (X_3)	0,183	0,021	Signifikan

Sumber: Lampiran 2

Tabel 4 menunjukkan hasil nilai estimasi regresi berganda dapat dilihat pengaruh variabel *independent* Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap variabel *dependent* Belanja Daerah di Jawa Timur tahun 2012-2016 maka diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,935 + 0,206X_1 + 0,347X_2 + 0,183X_3 + e$$

Uji Statistik

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto secara bersama – sama terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. Hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Uji F

Model	F_{tabel}	F_{hitung}	Sig.
Residual	2,65	17,018	0,000 ^b

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan model memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan $R_{hitung} > R_{tabel}$, maka secara bersama – sama (simultan) variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Daerah.

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t sebagai berikut:

Tabel 6.

Hasil Uji t				
Variabel	T _{tabel}	T _{hitung}	Sig	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (X1)	1,652	5,711	0,000	H ₁ Diterima
Dana Alokasi Umum (X2)	1,652	4,915	0,000	H ₂ Diterima
Produk Domestik Regional Bruto (X3)	1,652	3,252	0,021	H ₃ Diterima

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui besar dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- Variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai Thitung sebesar 5,711 > Ttabel sebesar 1,654 dan signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (H1 Diterima).
- Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai Thitung sebesar 2,127 > Ttabel sebesar 1,654 dan signifikansi 0,000 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara parsial variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (H2 Ditolak).
- Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X3) memiliki nilai Thitung sebesar 6,263 > Ttabel sebesar 1,654 dan signifikansi 0,021 < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara parsial variabel Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah (H3 Diterima).

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen yang hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan *Adjusted R²* (Ghozali, 2005). Hasil uji Koefisien Determinasi (R²) sebagai berikut:

Tabel 7.		
Hasil Koefisien Determinasi		
Model	R Square	Adjusted R Square
1	0,820	0,772

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 7 terdapat nilai *Adjusted R square* sebesar 0,772. Persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat diperoleh dengan mengalikan nilai *Adjusted R square* dengan 100%. Hasil yang diperoleh dari uji determinasi adalah 77,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel- independen dalam menjelaskan varian variabel dependen adalah sebesar 77,2%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam hal ini variabel – variabel bebas tersebut tidak otogonal. Variabel yang

bersifat ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya sama dengan nol. Dalam uji ini dilakukan pendeteksian terlebih dahulu, kemudian jika hal tersebut terjadi, barulah dilakukan tindakan untuk menghilangkan efek dari multikolinieritas. Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas maka dapat dilakukan dengan dengan menguji koefisien antar variabel independen. Apabila koefisien korelasinya cukup tinggi diatas 0,85 maka diduga model tersebut terdapat multikolinieritas. Sebaliknya, Apabila koefisien korelasi rendah dibawah 0,85 maka model tersebut tidak terdapat multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 8.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Koefisien Korelasi	Keterangan
X ₁ X ₂	0,518	tidak terjadi multikolinieritas
X ₂ X ₃	0,806	tidak terjadi multikolinieritas
X ₃ X ₁	0,162	tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: lampiran 2

Berdasarkan hasil analisis *Collinearity Statistics* yang dapat dilihat pada tabel 8 , diketahui bahwa model tidak terjadi multikolinieritas. Hal tersebut ditandai dengan nilai korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari 0,85.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya (t-1). Secara sederhana analisis yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terdapat variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Beberapa cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga dengan mengubah model regresi kedalam bentuk persamaan beda umum (*generalized difference equation*). Hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 9.
Hasil Uji Autokorelasi

DU	Nilai <i>Durbin-Watson</i>	4-DU	Keterangan
1,794	1,924	2,076	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9 tersebut, dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah 1,924. Nilai tersebut Angka *Durbin-Watson* diantara nilai DU dan 4-DU. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah menguji sebuah model regresi apakah terjadi ketidaksamaan varians dan residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dan residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Jika varians berbeda, disebut heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji scatter plot. Apabila data menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Hasil uji heteroskedastisitas dengan *glesjer* sebagai berikut:

Tabel 10.
Hasil Uji Glesjer

Variabel	Sig	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah (X1)	0,228	Tidak terjadi Heterokesdatisitas
Dana Alokasi Umum (X2)	0,302	Tidak terjadi Heterokesdatisitas
Produk Domestik Regional Bruto (X3)	0,712	Tidak terjadi Heterokesdatisitas

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Produk Domestik Regional Bruto memiliki nilai signifikansi masing-masing variabel $> 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Konsep pengujian ini menggunakan pendekatan *Jarque-berra test* (JB-test). Bila nilai $JB_{hitung} > \chi^2$ tabel atau nilai probabilitas $JB_{hitung} < \text{nilai probabilitas } (\alpha = 5\%)$, maka data terdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan menggunakan *Jarque – Berra Test* sebagai berikut:

Tabel 11.
Hasil Uji Jarque – Berra Test

Nilai Jarque – Berra	Nilai Signifikansi	Keterangan
1,628	0,443	Terdistribusi normal

Sumber: Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 11 hasil pengujian *Jarque – Berra Test*, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,443. Bila nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka artinya data terdistribusi normal.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Jumlah Belanja Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah juga dapat diartikan sebagai penerimaan daerah yang bersumber dari hasil ekonomi daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur belanja daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan belanja daerah, apabila suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang rendah maka belanja daerah suatu wilayah akan semakin rendah pula.

Secara teori pendapatan asli daerah didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Menurut penulis, Semakin besar pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah, maka pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan. Semakin kecil pajak daerah, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka akan menurunkan pendapatan asli daerah disuatu daerah tersebut.

Dalam konteks Internasional, beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh pendapatan daerah terhadap belanja (di antaranya adalah Cheng, 1999; Friedman, 1978; Hoover dan Shefluin, 1992 dalam Syukri Abdulah Halim), Chang (1999) menemukan

bahwa hipotesis pajak-belanja berlaku untuk kasus Pemda di beberapa negara. Friedman (1978) dalam Syukri Abdulah Halim menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanj daerah, sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hoover dan Sheffrin (1992) dalam Syukri Abdulah Halim secara empiris menemukan adanya perbedaan hubungan dalam dua rentang waktu berbeda. Mereka menemukan bahwa untuk sampel data sebelum pertengahan tahun 1960-an pajak berpengaruh terhadap belanja, sementara untuk sampel data sesudah tahun 1960-an pendapatan daerah dan belanja tidak saling mempengaruhi (*causally independent*).

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang signifikan positif terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Dari hasil uji t yang dilakukan, nilai yang dihasilkan untuk variabel PAD sebesar 5,711 (merujuk pada tabel hasil uji t). Nilai tersebut lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1.652. Dengan nilai t hitung > t tabel, maka variabel PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB). Hal tersebut diperkuat dengan nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitas $\alpha=0.05$. Sehingga, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indiyani (2013) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi misalokasi. Penentuan dana alokasi umum dilakukan untuk memperhatikan kebutuhan suatu daerah. Hal ini mengindikasikan jika terjadi peningkatan dana alokasi umum maka kemandirian suatu daerah akan semakin rendah.

Holtz-Eakin *et al* dalam Abdullah dan Halim (2003) menyatakan bahwa terdapat keterikatan sangat erat antara transfer dari Pempus dengan belanja pemerintah daerah. Studi Legrenzi dan Milas dalam Abdullah dan Halim (2003), menggunakan sampel *municipalities* di Itali, menemukan bukti empiris bahwa dalam jangka panjang transfer berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik mereka menegaskan bahwa variabel-variabel kebijakan Pemda dalam jangka pendek disesuaikan (*adjusted*) dengan transfer yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon yang non-linear dan *asymmetric*. Gamkhar dan Oates dalam Abdullah dan Halim (2003) menganalisis respon Pemda terhadap perubahan jumlah transfer dan pemerintah federal di Amerika Serikat untuk tahun 1953-1991. Mereka menyatakan bahwa pengurangan jumlah transfer (*cuts in federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Studi Holtz-Eakin *et al* (1994) menganalisis model *maximizing under uncertainty of intertemporal utility function* dengan menggunakan data runtun waktu selama tahun 1934-1991 untuk mengetahui seberapa jauh pengeluaran daerah dapat dirasionalkan melalui suatu model, dimana keputusan-keputusan didasarkan pada ketersediaan sumber daya secara permanen, bukan ketersediaan yang sifatnya temporer. Mereka menemukan bahwa semua *current spending* ditentukan oleh *current resources*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dana alokasi umum ternyata berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan dari uji t yang telah dilakukan pada tabel 4.5. Variabel DAU yang didapatkan untuk nilai t hitung sebesar 4,915 yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,652. Probabilitas yang dihasilkan sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara

signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah

PDRB merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang di produksi di wilayah (regional) tertentu dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) (BPS, 2010). Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun bersangkutan yang mengurangi kekayaan pemerintah daerah. Dalam struktur anggaran daerah dengan pendekatan kinerja, pengeluaran daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, kelompok dan jenis belanja. Belanja daerah menurut organisasi adalah suatu kesatuan penggunaan seperti sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya. Kelompok belanja misalnya belanja administrasi umum, belanja operasi dan biaya pemeliharaan serta belanja investasi. Jenis belanja misalnya belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, dan belanja lain-lain.

Hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto berpengaruh positif terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan dari uji t yang telah dilakukan pada tabel 4.5. Variabel DAU yang didapatkan untuk nilai t hitung sebesar 3,252 yang lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,652. Probabilitas yang dihasilkan oleh penelitian sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tuasikal (2014) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016.

SIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian regresi linier berganda atas Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Daerah semakin meningkat.
2. Hasil pengujian regresi linier berganda atas Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Belanja Daerah semakin meningkat.
3. Hasil pengujian regresi linier berganda atas Produk Domestik Regional Bruto terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2016 menunjukkan hubungan yang positif signifikan. Semakin tinggi Produk Domestik Regional Bruto maka Belanja Daerah semakin meningkat

Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Dana Alokasi Umum disarankan untuk memperhatikan produktivitas dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal pencarian atau kesempatan kerja di daerahnya masing-masing agar dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.

REFERENSI

- Adisasmita, R. 2011. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Boeke, J. H. 1953. *Memperkenalkan Teori Pertumbuhan Ekonomi Ganda*. Jakarta : YOI.
- Chang, T., dan Y. Ho. 2002. **Tax or Spend, What Cause What: Taiwan's Experience**. *International Journal of Business and Economics*. 1(2): 157-165.
- Cheng, B. S. 1999. **Casuality Between Taxes and Expenditure : Evidence from Latin American Countries**. *Journal of Economics and Finance*. 23(2): 184-192.
- Friedman, M. 1978. **The Limitation of Tax Limitation**. *Policy Review*. 5: 7-14.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program Spss*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A., dan S. Abdullah. 2004. **Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali**. *Jurnal Ekonomi STEI No.2 / Tahun XIII / 25*.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Himran, Y. dkk. 2014. **Analisis Kinerja Keuangan dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2007 – 2013 di Kabupaten Banggai**. *Jurnal Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Holtz-Eaken, D. H., H. S. Rosen, dan S. Tilly. 1994. In **Tertemporal Analysis of State an Local Government Spending: Theory and Test**. *Journal of Urban Economics*. 35: 159-174.
- Hoover, K. D., dan S. M. Sheffrin. 1992. **Causation, Spending and Taxes: Sand in the Sandbox or Tax Collector for the Welfare State?**. *The American Economics Review*. 82(1): 225-248.
- Indiyani, D. A. 2014. **Pengaruh PDRB , Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal**. *Jurnal Ekonomi*.
- Jhingan, M. I. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaho, J. R. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia Tentang Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Miraza, B. H. 2005. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Bandung : ISEI.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : Grasindo.
- Siswanto, G. 2014. **Pengembangan Ekonomi Wilayah Kota Metro Sebagai Salah Satu Kawasan Andalan Provinsi Lampung**. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Suparman, M., dan Suwarna. 2003. *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung : PT. Alumni.
- Supranto. 1999. *Statistik Multivariat*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suprpto, T. 2006. **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam Masa Otonomi Daerah Tahun 2000-2004**. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Indonesia Yogyakarta.
- Syamsi, I. 1986. *Pokok-pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemograman, dan Pengangguran Pembangunan Tingkat Nasional*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Wenny, C. D. 2012. **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan**. *Jurnal Ilmiah*. 2(1) : 39-51.